

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi diciptakan untuk mempermudah segala aktivitas manusia dalam kehidupan sehari – hari. Pada dasarnya, teknologi sangatlah berperan penting untuk memenuhi segala kebutuhan manusia termasuk dalam hal informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, kebutuhan akan informasi kian signifikan mengingat kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Informasi yang ada di berbagai konteks dapat memudahkan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan, salah satunya dalam hal pendidikan. Pengembangan media teknologi informasi dan komunikasi saat ini memang tengah gencar diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasaan keahlian yang memadai guna memanfaatkan TIK sebagai media penunjang dalam pembelajaran.

Di Indonesia saat ini, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tengah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Selain itu, kebutuhan akan tenaga pengajar yang kompeten juga menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Namun kenyataannya saat ini, masih ada beberapa guru yang belum sepenuhnya menguasai kompetensi TIK. Para guru tersebut berada tersebar di beberapa daerah yang belum bisa dikatakan memadai, khususnya dalam bidang pendidikan. Salah satu yang bisa dijadikan sorotan yakni daerah Terpencil, Terdepan, Tertinggal (3T). Daerah yang bisa disebut 3T ini memang sudah menjadi perhatian dalam mengupayakan pembelajaran yang efektif dan merata. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa yang belum terpenuhi, hal ini bisa dikarenakan akses untuk ke lokasi yang masih sulit dijangkau, sehingga menghambat proses pembelajaran.

Pada dasarnya, Kompetensi menurut Departemen Pendidikan Nasional (2006 : 2) adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Dengan kata lain kompetensi itu merupakan kemampuan unjuk kerja (*ability to do*) yang dilatarbelakangi oleh penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Hal ini mengandung arti bahwa kualitas unjuk kerja itu ditentukan oleh kualitas penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Semakin tinggi kualitas guru dalam

penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan, semakin tinggi pula unjuk kerjanya, begitu pula sebaliknya. Jadi ada korelasi positif antara tingkat penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan kompetensi yang terbentuk.¹

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom), adalah sebuah lembaga pemerintahan dibawah naungan Kemendikbud RI, yang dibentuk untuk menyelaraskan serta menyediakan segala kebutuhan informasi dan komunikasi, khususnya yang menyangkut dengan pendidikan di Indonesia. Beberapa program – program edukasi yang dibuat oleh Pustekkom, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi bagi peserta didik di seluruh penjuru Indonesia, dengan menghadirkan beberapa *platform* pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.

Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI KOMINFO), adalah lembaga yang pada awalnya ialah unit eselon yang akhirnya berubah menjadi unit pelaksana teknis non eselon dengan tujuan meningkatkan fleksibilitas, efektivitas, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Kominfo pada tahun 2017. Transformasi organisasi dan tata kerja ini dilakukan untuk

¹ Hamalik, Oemar, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), p.11.

meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan program Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika, yang memang sejak tahun 2015 telah mengalami redesign. Transformasi BPPPTI didasari pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan struktur organisasi, yang semula strukturnya didasari pada proses (*process-based*), menjadi didasarkan pada output layanan (*output-based*), yaitu infrastruktur dan ekosistem. Namun tetap menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.²

Dengan adanya bentuk kerja sama kedua instansi tersebut, maka dibuatlah Program Sekolah Universal Service Obligation (USO). Dalam hal ini, Program sekolah USO adalah bentuk upaya dari pemerintah dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas dan merata untuk peserta didik. Program sekolah *Universal Service Obligation* (USO), ialah sebuah program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dalam hal ini dilaksanakan oleh Pustekkom Kemdikbud) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (dalam hal ini dilaksanakan oleh

² <https://www.baktikominfo.id/id/profile/sejarah-singkat>, (diakses pada Rabu, 23 Januari 2019 pukul 12.00)

BPPPTI Kominfo). Pustekkom bertugas dalam hal usulan sekolah, pemanfaatan/pelatihan, dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) sedangkan BPPPTI Kominfo, bertugas dalam hal menyediakan layanan sebagai penunjang berjalannya program tersebut.

Para Penerima program USO yakni para guru di tiap sekolah daerah 3T, akan mendapatkan pendampingan berupa pengetahuan umum tentang TIK, serta pelatihan peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan TIK sebagai media dalam pembelajaran di kelas. Para guru tersebut dilatih secara khusus mengenai pengetahuan umum dalam bidang TIK serta menggunakan sarana dan prasarana yang baik. Program ini, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru sebagai tenaga pengajar di sekolah, dalam mengelola jejaring dan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran di kelas yang terdiri dari 4 tingkatan level kompetensi.

Pada level 1 (literasi), terfokus pada pengembangan literasi teknologi guru untuk mengintegrasikan peralatan TIK ke dalam kurikulum. Selanjutnya pada level 2 (implementasi), adalah tahapan yang lebih mendalam dan mempunyai dampak terhadap pembelajaran. Dalam hal ini, tahapan tersebut memerlukan siswa sebagai pelaku untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam rangka peningkatan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Sedangkan pada level 3 (kreasi), menempatkan fokusnya pada proses kreasi pengetahuan, inovasi, dan

partisipasi dalam pembelajaran seumur hidup. Terakhir yaitu pada level 4 (berbagi pengetahuan), tahapan yang paling lanjut dalam pemanfaatan TIK oleh guru karena melibatkan pendidik sebagai agen pembaharuan melalui berbagai kegiatan berbagi dan bertukar pengetahuan, baik dengan sesama guru maupun dengan masyarakat umum, melalui berbagai cara, strategi, bentuk, dan modus, untuk menciptakan komunitas belajar.

Berdasarkan penjelasan 4 level di atas, guru dituntut untuk memiliki standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ketersediaan dan kesiapan dari SDM yang kompeten sangatlah dibutuhkan. Namun pada kenyataannya, dari beberapa data yang diperoleh BPPPTI Kominfo, terdapat kendala di lapangan yang harus segera diatasi. Kendala yang dimaksud yaitu ketika koordinasi yang berjalan lemah/ tidak sesuai, utilisasi yang cenderung rendah, hingga ketidakseimbangan antara pemanfaatan infrastruktur dengan pemberdayaan SDM yang dimiliki menjadikan hambatan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, berdasarkan pendapat yang diambil dari beberapa peserta program tersebut, masih banyak materi yang perlu disampaikan, seperti pemerataan pengetahuan tentang keterampilan mengajar dan mengelola kelas yang baik menggunakan perangkat internet dan komputer sebagai media belajar, wawasan mengenai *hardware* dan *software* yang digunakan untuk pembelajaran maupun administrasi pendidikan, serta cara

untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar di kelas. Dari berbagai persoalan di atas terdapat kesenjangan dalam program pelatihan tersebut.

Untuk menghasilkan level efektifitas pengetahuan TIK yang sesuai dengan standar, guru perlu memiliki kompetensi yang memadai. Agar setiap guru memiliki kompetensi TIK yang relevan dengan bidangnya, serta dapat mencapai standar yang diinginkan, dapat diberikan berupa program pelatihan atau pengembangan *skill*. Oleh karena itu, dalam menentukan program apa yang dibutuhkan, perlu dilaksanakan analisis kebutuhan terlebih dahulu.

Dalam definisi Teknologi Pendidikan menurut Association for Educational Communications and Technology (AECT) tahun 2004 merupakan:

“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological processes and resources.”³

Definisi Teknologi Pendidikan di atas terdapat penekanan dalam memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan dan pengelolaan proses dan sumber teknologi yang tepat.

³ Dewi Salma Prawiladilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012) hal. 31

Salah satu pendekatan dalam memfasilitasi belajar adalah melalui kegiatan analisis kebutuhan yang bertujuan untuk menemukan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang diharapkan/ideal, kemudian mengidentifikasi kebutuhan - kebutuhan yang diperlukan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, dengan mempunyai kemampuan pemanfaatan TIK yang sesuai dengan kebutuhan, dapat membantu pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan baik, serta menjadikan guru mempunyai kompetensi TIK yang memadai. Kompetensi yang dibutuhkan tersebut bisa meliputi dari internal si guru tersebut, seperti pengetahuan umum, keterampilan dan sikap yang dimiliki maupun faktor eksternal dari lingkungan sekolah, budaya sekolah dan sebagainya.

Dari deskripsi analisis kebutuhan di atas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian analisis kebutuhan untuk dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan keadaan seperti apa yang diharapkan. Dari situlah akan terlihat persoalan yang ada dan kemudian diidentifikasi apa saja yang sedang dibutuhkan. Selanjutnya, jika kebutuhan – kebutuhan tersebut telah teridentifikasi, maka perlu dilakukan tindakan berupa rekomendasi solusi yang dianggap tepat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. “Analisis Kebutuhan untuk Peningkatan Kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru di Program Sekolah *Universal Service Obligation*.”

B. Identifikasi masalah

Dengan ini, peneliti membuat identifikasi masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu :

- 1) Apa saja masalah dan kesenjangan yang ditemui pada kompetensi TIK guru di wilayah 3T?
- 2) Apa saja penyebab kesenjangan kompetensi yang terjadi pada guru di daerah 3T?
- 3) Bagaimana analisis kebutuhan untuk peningkatan kompetensi TIK guru di wilayah 3T dalam program sekolah *Universal Service Obligation*?
- 4) Kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh guru di wilayah 3T dalam rangka meningkatkan kompetensinya?
- 5) Rekomendasi apa saja yang dapat diberikan guna menjawab kebutuhan guru dan meningkatkan kompetensi guru di wilayah 3T?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian ini, akan dibatasi pada satu masalah yaitu bagaimana analisis kebutuhan dalam peningkatan kompetensi TIK pada guru di wilayah 3T di program sekolah *Universal Service Obligation*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang disebutkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Kebutuhan dalam Peningkatan Kompetensi TIK pada Guru di Wilayah 3T di program sekolah *Universal Service Obligation*”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mencari kesenjangan yang ada pada Program Sekolah Universal Service Obligation.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi instansi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan instansi terkait sebagai acuan dalam pelaksanaan Program untuk peningkatan Kompetensi TIK guru di program sekolah *Universal Service Obligation*.

2. Manfaat bagi peneliti

Hasil analisis penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan Program Peningkatan Kompetensi TIK guru di program sekolah *Universal Service Obligation*.